

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus Salim Andi Gadjong. 2004. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amninudin, 2013. *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam*. Bandung: Angkasa.
- Asmadi Alsa, 2004, *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Eko Budihardjo & Sudanti Hardjohubojo. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Almunia.
- Giri Wiarto, 2017, *Tanggap Darurat Bencana Alam*, Gosyen. Jogjakarta: Publishing.
- Johara T. Jayaginata, 1999, *Tata Guna Lahan dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, Bandung: ITB Press.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,. Malang: Banyumedia.
- Kumalasari, B. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapasitas Pemerintahan Lokal*. Yogyakarta: Gava Medika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif, Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahnan. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulngn Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2 Seri D)

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 57).

3. Jurnal

Amni Zarkasyi, 2015, *Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Banjar Negara*.Vol. 1. No.1.

Candra Puspita K, 2014, *Kajian Permasalahan Kebijakan Penetapan Status Bencana, Kelembagaan Bpbd, Dan Pengelolaan Bantuan Pasca Terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2000*, BPK RI, Vol. 1, No. 1.

Didi Ahdi, 2015, *Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko*, Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya.Vol. 5, No. 1.

Donni Kurniawan dan Tjihno Windryanto, 2014, *Implementasi Kebijakan UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman* ,Vol. 3, No. 2.

- Ishviati Joenaini Koenti, 2016, *Diskresi dalam Penanggulangan Bencana di DIY dengan Paradigma Kontinjensi*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, Vol. 23, No. 3.
- Kemal Hidayah, "Disaster Management Policies In The Era of Regional Autonomy (Study on Handling Cases Surge Lumpur Lapindo Brantas", *Jurnal Borneo Adminidtrator*, Volume 11 Nomor 3 (2015).
- Michael Barama. Januari 2016. PPelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol 22
- Newport, Jeyanth K. Dan Jawahar, Godfrey G. *Community Participation and Public Awareness in Disaster Mitigation, Emerald*, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 13 No.1, 2003, hal. 33.
- Parton, Douglas, *Disaster Prepadness; a Social-Cognitive Perspective*, Emerald, Emerald Group Publisihing Limited, Vol. 13 No.3, 2003, hal 210.
- Raden, C.E.P, dkk, 2011, Kearifan Lokal tentang Mitigasi Bencana pada Masyarakat Baduy. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Vol. 15.
- Sunarno, 2015, *Good Land Principle in Disaster Region Areas*, Yogyakarta: Jurnal Media Hukum UMY, Vol.22 No. 1.

4. Hasil Penelitian

- Arifin, Saru. April, 2010. "Paradigma Pengurangan Resiko Bencana Dalam Sistem Hukum Kebencanaan dan Implikasinya Terhadap Respon Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana". (Laporan Penelitian Dosen Muda). Yogyakarta. FH Universitas Islam Indonesia.

5. Internet dan Surat Kabar

- Soemarno MS, Pendugaan Risiko Bencana, <http://marno.lecture.ub.ac.id/2012/07/pendugaan-risiko-bencana/>.
- Heather Brown, *Pengertian Bencana Menurut Para Ahli*, <https://www.scribd.com/doc/184988175/Pengertian-Bencana-Menurut-Para-Ahli>

Pusat Ilmu Geografi Indonesia, *Pengertian Bencana Alam Tanah Longsor dan Banjir*, <https://ilmugeografi.com/bencana-alam/pengertian-bencana-alam>.

FKBPKERJO, *Bencana Alam*, <https://fkpbkerjo.wordpress.com/tag/dampak-bencana-alam/>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Definisi dan Jenis Bencana*, <https://www.bnpb.go.id/home/definisi.html>

Kamalia Aulia, *Analisa Risiko Bencana*, <https://www.scribd.com/document/337835821/analisa-resiko-bencana>

Soemarno MS, *Pendugaan Risiko Bencana*, <http://marno.lecture.ub.ac.id/2012/07/pendugaan-risiko-bencana/>.

Pudji Pujiono, “Perspektif dan Kerangka Kebijakan Penanggulangan Bencana”, Makalah disampaikan pada Stadium General, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 24 Mei 2017.

Lisa Triwahyuni, Sobirin, Ratna Saraswati. *Analiss Spasial Wilayah Potensi Longsor dengan Metode SINMAP dan SMORPH di Kabupaten Kulon Progo, DIY. Industrial Research Workshop and National Seminar. Politeknik Negeri Bandung. 26-27 Juli 2017.*

Sipd.Kemendagri. *visi, misi, tujuan dan sasaran*. https://sipd.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_248_2016.pdf

BPBD Kulon Progo. *Visi misi*. <http://bpbd.kulonprogokab.go.id/pages-29-visi-misi.html>

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Januari 2017. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. <https://lenterakecil.com/penulisan-daftar-pustaka-dari-internet/>

DPUPR Pemerintah Kota Malang. *Syarat dan Prosedur Advice Plainning*. <https://dpupr.malangkota.go.id/prosedur-pengurusan-advice-planning-ap/>